

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi merupakan tahapan yang saat ini sangat berkembang dan sangat diunggulkan dalam berbagai bidang, misalnya teknologi informasi di gunakan sebagai alat dalam penyampaian informasi kepada setiap masyarakat di dunia agar masyarakat dapat mengetahui apa-apa saja yang terjadi di masyarakat sekarang atau penunjuk jangka waktu kedepannya, teknologi informasi juga digunakan dalam pelayanan umum kepada masyarakat yang berupa pembayaran pajak, pengisian daftar riwayat hidup, dan hal-hal yang menyangkut masalah personal diri masyarakat yang menggunakan teknologi informasi itu sendiri.

Implementasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih hanya sebatas hubungan antara institusi dalam pemerintah. Kelebihan dari sistem ini tentu saja meningkatkan efisiensi, data dapat dikirim secara cepat, meminimalisasi manipulasi data kependudukan dan lain-lain.

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya *governance*. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah.

Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tertuang dalam Bab IV Urusan Pemerintahan Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) diatur tentang pelayanan dasar yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berbunyi :

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; m.

kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan”.

Konsep *smart Province* ini merupakan sebuah konsep inovasi daerah yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada bab XXI bertajuk Inovasi daerah Pasal 386 sampai dengan Pasal 390. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan inovasi yang menunjang pembangunan daerah.

Dengan adanya sistem berbasis informasi teknologi yang sering disebut dengan go.it, kinerja pemerintah daerah khususnya dimasing-masing SKPD bisa berjalan maksimal dalam melayani publik, karena semua pelayanan menggunakan sistem berbasis teknologi. Menuju provinsi cerdas dengan layanan berbasis teknologi informasi, sejumlah aplikasi pengelolaan daerah dibuka secara transparan ke publik dan bisa diakses di portal resmi Pemerintah Provinsi Riau di riau.go.id.

E-government sendiri sebenarnya bukan hal baru didalam tata Pemerintahan, *E-government* sendiri sudah banyak diterapkan di negara-negara berkembang maupun negara maju. Fungsi *E-government* itu sendiri diutamakan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat akan perkembangan yang terjadi di lingkup Pemerintahan itu sendiri, serta memberikan transparasi data yang lebih mudah dilihat dan diamati bersama oleh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Riau punya rancangan besar menjadikan wilayah yang dijuluki Bumi Lancang Kuning ini sebagai *Smart Province*. Sebagai bentuk keseriusan menjadikan daerah yang dipimpinnya menjadi

provinsi cerdas dan berbasis teknologi, rancangan program sistem berbasis informasi teknologi (go.it) tersebut di luncurkan pada tanggal 9 Agustus 2016, yang di dasarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Keterbukaan. Dengan *smart province* ini pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi untuk aplikasi digital dalam memaksimalkan pelayanan. Karena, program ini bakal diaplikasikan secara menyeluruh di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi.

Secara umum, *Smart Government* adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Konsep, *e-government* berfokus pada inisiatif supaya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Kemudian beberapa waktu setelahnya, implementasi *e-government* mulai terlihat dengan adanya pelayanan secara real time dan lebih cepat di instansi-instansi pemerintahan.

Sayangnya, kelemahan dari konsep *e-government* adalah pelayanannya bersifat eksklusif, artinya masih terpisah-pisah untuk tiap layanan dan instansi. Dengan landasan *e-government* yang sudah ada, maka kemudian muncul versi pembaruan yang bernama *Smart Government*. Di dalam *Smart Government* pelayanan publik dilakukan secara terpusat.

Dalam beberapa praktiknya di Provinsi Riau sampai saat ini, *Smart Government* memiliki nama dan integrasi sistem yang berbeda-beda untuk tiap SKPD ataupun instansi. Namun konsep yang dibawa sebenarnya sama, yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Telah banyak *best practice* dari beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang berhasil dengan konsep *smart government* ini.

Best Practice terhadap pelaksanaan *smart government* akan segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Situasi saat ini, bahwa beberapa SKPD telah memiliki beberapa aplikasi-aplikasi tersendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan baik antar pemerintah, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat. Langkah ke depan untuk mewujudkan *smart government* adalah mengintegrasikan seluruh aplikasi tersebut sehingga dapat menciptakan kemudahan akses terhadap penerapan Informasi teknologi kepada masyarakat dan pengguna layanan.

Program *Go It* menuju Riau *Smart Province* ini sudah dijalankan dari tahun 2016, yang harus kita pahami adalah pelayanan publik pada tingkat Provinsi tidak serta merta sama dengan kabupaten/kota dikarenakan kewenangan yang diatur pada urusan pemerintahan masing-masing. Menuju provinsi cerdas dengan layanan berbasis teknologi informasi, sejumlah aplikasi pengelolaan daerah sudah dibuka secara transparan ke publik dan bisa diakses di portal resmi Pemerintah Provinsi Riau di riau.go.id.

Konsep yang dapat ditawarkan melalui *smart government* tingkat provinsi dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, pelayanan pendidikan di dinas pendidikan, serta pelayanan perpajakan pada dinas pendapatan.

Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah bagaimana memudahkan masyarakat melakukan pelayanan serta mendapatkan informasi layanan dan mekanisme layanan hanya cukup dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari antrian panjang dan pengisian formulir yang berlembar-lembar. Selanjutnya adalah dalam hal transparansi serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dapat diakses oleh publik. Sebagai contoh, informasi tentang tahapan dan hasil perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi pemerintah daerah, realisasi kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan, serta informasi pemerintah lainnya yang dapat disampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah.

Dalam hal pelayanan antar pemerintah, harus mulai melangkah kepada sistem kerja yang efisien serta *paperless*. Penggunaan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kerja seperti *e-office*, *e-planing*, *e-budgeting*, *e-monev*, *e-performance*, *e-kepegawaian* dan aplikasi lainnya tentunya akan berdampak kepada kinerja yang lebih terukur, efisien serta lebih murah mengingat akan mengurangi penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang saat ini penganggarnya masih sangat besar. Tentunya

keberhasilan dari *smart government* ini adalah integrasi terhadap seluruh layanan yang ada saat ini maupun yang akan dikembangkan serta aplikasi yang ada disetiap SKPD menjadi satu layanan yang dapat mudah diakses oleh masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur *e-Government*, Bidang Layanan *e-Government*, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

Website SKPD .riau.go.id merupakan salah satu bentuk kegiatan mendukung pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Dimana Pemerintah Provinsi Riau berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik secara terbuka dan efisien kepada publik yang didasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (*e-Office*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau ini, bertujuan untuk Menciptakan koordinasi, integasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung

penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 ini menjelaskan bahwa, Aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) sebagaimana dimaksud dikembangkan dan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yaitu “Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing” yang secara tidak langsung mendukung Visi Riau 2020.

Dasar pelaksanaan aplikasi perkantoran secara elektronik (*e-Office*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik (*E-Office*) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan adanya sarana melalui saluran internet ini, tercipta transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Website Dinas Kominfo Provinsi Riau membuat, menyiapkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik yang diterima dan diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana oleh badan publik dan masyarakat yang membutuhkan berbagai macam informasi publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi sudah

melakukan berbagai upaya dalam peningkatan nilai e-government Provinsi Riau, salah satunya Perekrutan Tenaga IT yang disebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Berikut data aplikasi pelayanan pada setiap SKPD Provinsi Riau yang terdaftar pada layanan go.it Provinsi Riau :

Tabel 1.1
Data Aplikasi Pelayanan SKPD Pemerintah Provinsi Riau

No	SKPD	Nama App	Link	Status
1	Badan Kepegawaian Daerah	SMART SKPD	http://skpd.asn.riau.go.id/auth/login	Aktif
2	Badan Kepegawaian Daerah	SMART SKP	http://skp.asn.riau.go.id/	Aktif
3	Badan Kepegawaian Daerah	SMART APARATUR	http://asn.riau.go.id/auth/login	Aktif
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sistem Informasi Rencana Aksi Terpadu	http://kesbangpol.kemendagri.go.id/sipks/rencana_aksi/	Aktif
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau	Website BPBD Provinsi Riau	http://bpbd.riau.go.id	Aktif
6	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Aplikasi Realtime Display	http://badanpendapatan.riau.go.id/realtime_display/	Aktif
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sida Lanri	http://sida.lanri.info	Aktif
8	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa	SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)	https://lpse.riau.go.id/eproc4/	Aktif
9	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa	SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	https://sirup.lkpp.go.id/sirup/	Aktif
10	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa	SIVAMONTOK (v 2.0.1)	https://monev.riau.go.id/	Aktif
11	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa	SULaP (Sistem Layanan Pengadaan)	http://sulap.riau.go.id/ulp/pengumuman.php	Aktif
12	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang Dan Jasa	TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)	http://monev.lkpp.go.id/tepra	Aktif
13	Biro Pemerintah Dan Otonomi Daerah	E-LPPD	http://tapem.riau.go.id/LPPD	Aktif
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau	Aplikasi Web RESGO	http://resgo.riau.go.id	Aktif

No	SKPD	Nama App	Link	Status
15	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	SIMDA	http://www.bpkp.go.id/	Aktif
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	SIPKD	http://203.130.206.117/	Aktif
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	DJP Online	https://djponline.pajak.go.id/	Aktif
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	MONEV	http://monev.riau.go.id	Aktif
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	E-REKON	http://e-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/	Aktif
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	OMSPAN	http://spanint.kemenkeu.go.id	Aktif
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	RKAKLDIPA	https://rkakldipa.kemenkeu.go.id/	Aktif
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	E-MONEV (SMART)	http://monev.anggaran.depkeu.go.id	Aktif
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau	MONEV BAPPENAS	http://e-monev.bappenas.go.id/	Aktif
24	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Lancang Kuning Bersinar	http://disdukcapildaldukkb.riau.go.id/	Aktif
25	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau	SIMKP (Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan)	http://simkp.diskepang.riau.go.id	Aktif
26	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	http://rpbbi.dephut.go.id/	Aktif
27	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP)	http://sipnbp.phpl.menlhk.go.id:8080/sipnbp/home_default?	Aktif
28	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Sistem Informasi Legalitas Kayu	http://silk.dephut.go.id/index.php/about	Aktif
29	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)	http://sipuhh.dephut.net:7777/itts/HOME_DEFAULT	Aktif
30	Dinas Pariwisata Provinsi Riau	Bilik Destinasi	http://bilikdestinasi.pariwisata.riau.go.id/	Aktif
31	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Provinsi Riau	e-Office Riau	https://e-office.riau.go.id/	Aktif
32	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Provinsi Riau	monev IT	http://monevit.diskominfotik.riau.go.id/	Aktif

No	SKPD	Nama App	Link	Status
33	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Perizinan Online	http://perizinan.dpmpstp.riau.go.id	Aktif
34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	e-database Perizinan dan Non Perizinan se-Provinsi Riau	http://simpler.dpmpstp.riau.go.id	Aktif
35	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	LKPM Online	http://dblkpm.dpmpstp.riau.go.id	Aktif
36	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SKPD Online	http://simpler.dpmpstp.riau.go.id	Aktif
37	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Kalender Pendidikan	http://kalender.disdik.riau.go.id/	Aktif
38	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	SK Online Guru Honor Daerah Provinsi Riau	http://guruhonda.disdik.riau.go.id/	Aktif
39	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Guru Bantu Provinsi Riau	http://gurubantu.disdik.riau.go.id/	Aktif
40	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Data Pokok Pendidikan Provinsi Riau	http://dapodik.disdik.riau.go.id/	Aktif
41	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau	Website Operasi Perangkat Daerah (OPD)	http://dipersip@riau.go.id	Aktif
42	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Riau	Pustaka Digital (PADI)	http://#	Aktif
43	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau	e-office	https://e-office.riau.go.id	Aktif
44	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau	SiRUP-RKPP	https://sirup.lkpp.go.id/sirup	Aktif
45	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	iSikhnas	http://www.isikhnas.com	Aktif
46	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	e-rekon	http://e-rekon-lk.dipbn.kemenkeu.go.id	Aktif
47	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan	http://monev.anggaran.depkeu.go.id	Aktif
48	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	http://http://sipd.bangda.kemendagri.go.id/	Aktif
49	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Sistem Informasi Manajemen Statistik Peternakan	http://aplikasi2.pertanian.go.id/eformnak/login.php	Aktif
50	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	e-Proposal Kementerian Pertanian	https://eproposal.pertanian.go.id/	Aktif
51	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura,	E-BOKAR PERKEBUNAN	http://www.e-	Aktif

No	SKPD	Nama App	Link	Status
	Dan Perkebunan Provinsi Riau		bokar.disbun.riau.go.id	
52	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebunan Provinsi Riau	INFO HARGA TBS (TANDAN BUAH SEGAR) KELAPA SAWIT	http://distanbun.riau.go.id/page/harga/tbs	Aktif
53	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebunan Provinsi Riau	INFO HARGA SAYURAN	http://distanbun.riau.go.id/page/harga/sayuran	Aktif
54	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebunan Provinsi Riau	INFO HARGA BUAH	http://distanbun.riau.go.id/page/harga/buah	Aktif
55	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebunan Provinsi Riau	INFO HARGA PALAWIJA	http://distanbun.riau.go.id/page/harga/palawija	Aktif
56	Inspektorat	SIPTL	https://eauditee.bpk.go.id/	Aktif

Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Januari 2018

Dari tabel 1.1 diatas total aplikasi pelayanan yang sudah bias diakses berjumlah 56, sedangkan aplikasi yang aktif selama 24 jam berjumlah 52. Terlihat semua dari situs SKPD Pemerintah tersebut hanya beberapa saja yang masih jalan hingga sekarang, dan dapat kita ketahui dengan tidak jalannya situs Pemerintah itu berdampak pada tertutupnya akses terhadap Pemerintah yang dampak masyarakat tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi konsumsi publiknya itu keterbukaan informasi public (KIP). Sehingga dapat kita simpulkan sementara bahwa keadaan *e-government* di Provinsi Riau masih dalam bentuk penerapan luar saja, akan tetapi kinerja dan fungsi utama dari penerapan *e-government* itu sendiri masih belum maksimal, dan terkesan hanya berjalan ditempat.

Adanya 8 (delapan) SKPD yang belum menggunakan aplikasi e-office sama sekali, yaitu:

1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau
2. Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Riau
3. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau
4. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Riau
5. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau
6. Biro Administrasi Kemasyarakatan Setda Provinsi Riau
7. Sekretariat Korpri
8. Sekretariat Komisi Penjiaran Indonesia Daerah

Alasan belum digunakannya e-office pada 8 SKPD ini adalah karena kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan e-office pada SKPD tersebut, dan dari 53 tenaga ahli IT yang direkrut tidak mencukupi untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2017 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Riau Tahun 2017

KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program	Perkiraan Realisasi Capaian Target SKPD
1) Pengembangan dan Penataan Jaringan IT	Jumlah jaringan yang terpasang dan yang terpelihara	54 SKPD terkoneksi jaringan
2) Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau	akses internet Mbps	500 Mbps
3) Update dan Analisa Data Provinsi Riau	Jumlah data yang diupdate 70.000 data	58.000 data
4) Optimalisasi website riau.go.id	Jumlah website	Seluruh SKPD
5) Pola Kesisteman Pengelola e-government SKPD Provinsi Riau	Jumlah Terintegrasi dalam SKPD	54 SKPD
6) Sosialisasi e-government Pemerintah Provinsi	135 peserta	100 peserta

Sumber data : Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Desember 2017.

Terobosan dalam pelayanan berbasis teknologi informasi ini merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan maksimal. Sebab nanti tidak ada lagi masyarakat mengalami kesulitan dalam segala pengurusan administrasi, serta segala informasi yang dibutuhkan masyarakat dan Investor terhadap instansi terkait semuanya sudah dapat di akses dengan cepat dan mudah. Salah satu bentuk kemudahan yang diberikan lewat sistem ini, pengurusan izin dan administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau akan diberlakukan dengan sistem online.

Salah satu contoh aplikasi mengakses berapa biaya pajak kendaraan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melalui situs,

dengan tahapannya sebagai berikut :

1. Daftar dengan akses di <http://badanpendapatan.riau.go.id/realtime>
2. Pilih lokasi kendaraan Anda terdaftar ;
3. Pilih Samsat awal kendaraan Anda terdaftar ;
4. Masukkan Nomer Polisi yang akan dibayar dan Kode acak yang tersedia;
5. Akan muncul tampilan informasi pembayaran PKB yang harus dibayar;
6. Website akan menampilkan identifikasi kepemilikan ;
7. Masukkan Nomor Rangka & Nomor BPKB;
8. Pilih Samsat untuk pengesahan STNK.

Contoh lain dalam sistem perkantoran seperti layanan pada Badan Kepegawaian Daerah untuk kenaikan pangkat otomatis yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil dengan membuka situs <http://asn.riau.go.id/auth/login> dan ikuti petunjuk untuk memasuki Nomor Induk Pegawai (NIP).

Sistem pemerintahan modern ini juga dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau untuk membuat sistem pemerintahan lebih optimal dan tentunya lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Sistem pemerintahan modern yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk membuat sistem pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam berkoordinasi karena sistem aplikasi E-Government jumlah dan jenisnya cukup beragam. Sebagai contoh fasilitas E-Government disajikan pada portal Riau Go IT pemerintah provinsi Riau seperti pantauan

wartawan pada www.riau.go.id. Jika dilihat Dampak positif dari penerapan e-government, antara lain:

1. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan;
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.'
3. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference.

Sedangkan dampak negative dari penerapan *e-government*, antara lain:

1. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya *cyber crime* yang dapat merusak system Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada *e-government*.
2. Biaya, dalam pemerintahan yang menggunakan informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun sebelumnya untuk membuat infrastruktur dan teknisinya akan memiliki biaya yang sangat mahal.
4. Transparansi, Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi.

5. Privasi, setiap SKPD tidak akan ada lagi karena semua kegiatan terlihat dan tercantum dalam web setiap SKPD.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang menjadi tuntunan dan tidak mungkin lagi ditolak, apalagi dalam penerapan Program *Go It Menuju Riau Smart Province*.

Hal inilah yang menjadi topik penelitian yang akan diteliti lebih dalam mengenai bagaimana peranan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penerapan *e-government* itu, sehingga dapat kita ambil garis lurus yang menceritakan bagaimana tahapan-tahapan hingga penerapan *e-government* pada pasca dicanangkan program *Go It* menuju Riau *smart province*, dan apa manfaat yang dapat diambil dari penerapan *e-government* itu sendiri bagi masyarakat dan Pemerintahan Provinsi Riau.

Untuk mengetahui bagaimana kebenaran dari latar belakang masalah diatas, tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut. Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang **“Peranan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Dalam Program Sistem Berbasis Informasi Teknologi Menuju Riau Smart Province”**.

1.2 Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam rangka penelitian ini adalah bagaimana Peranan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dalam Program Go It Menuju Riau *Smart Province* guna membantu bagi lancarnya distribusi informasi dan layanan informasi publik kepada masyarakat, terutama sekali Informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan dan pemberian akses informasi oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sedangkan untuk kriteria SKPD yang telah menerapkan e-government adalah SKPD yang telah menjalankan aplikasi *e-office* baik itu surat masuk saja atau surat keluar saja atau pun sudah menjalankan keduanya (surat masuk dan keluar).

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peranan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Dalam Program Sistem Berbasis Informasi Teknologi Menuju Riau Smart Province terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum melaksanakan program Go.It dan apa usaha yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau untuk meningkatkan pelaksanaan Go It terhadap SKPD yang sudah melaksanakan program Go.It?
2. Apa saja faktor dan kendala dalam penerapan Program Sistem berbasis teknologi Menuju Riau *Smart Province* bagi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau jika dilihat dari

dampak negative terhadap penerapan program Go.It bagi Pemerintah Provinsi Riau?

3. Apa Kelebihan dan keunggulan dari program Go.It bagi setiap SKPD jika dilihat dari dampak positif terhadap Masyarakat maupun Pemerintah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau Dalam Program Sistem Berbasis Informasi Teknologi Menuju Riau Smart Province terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum melaksanakan program Go.It dan apa usaha yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau untuk meningkatkan pelaksanaan Go It terhadap SKPD yang sudah melaksanakan program Go.It.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan kendala dalam penerapan Program Sistem Berbasis Informasi Teknologi Menuju Riau *Smart Province* bagi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau jika dilihat dari dampak negative terhadap penerapan program Go.It bagi Pemerintah Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui Kelebihan dan keunggulan dari program Go.It bagi setiap SKPD jika dilihat dari dampak positif terhadap Masyarakat maupun Pemerintah Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan *e-government*.
- b. Disisi lain penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang Program *Go It Menuju Riau Smart Province*.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melihat gambaran mengenai peningkatan penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya program *Go IT* menuju Riau menjadi *smart province*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana untuk diterapkan Provinsi cerdas dengan layanan berbasis teknologi informasi.
- c. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.